

Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada DP3AKB Kabupaten Jember Tahun 2024

Silvi Tri Handayani¹, Lidia Ainun Fadilla², Salman Farizi³

¹ Program Studi Akuntansi Syariah, UIN KH Achmad Siddiq Jember,

Jl. Mataram No. 1, Karang Miuo, Mangli, Kec. Kaliwates, Jember , Indonesia.

^{1*}handayanisilvi21@gmail.com, ²lidiadafilla7@gmail.com, ³salman.uinkhas@gmail.com

Abstrak

The budget realization report is a financial statement issued by the government or an agency before preparing the cash flow statement and balance sheet. The Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning Service, as part of the government, is obligated to compile this report annually as a form of accountability to the public for the allocated funds. This study utilizes the 2024 budget realization report and analyzes it from three perspectives: variance, economic level, and effectiveness. The analysis aims to assess the financial performance of the Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning Service, ensuring efficiency and the absence of wasteful spending. The research employs a quantitative descriptive method, where the collected data is structured and analyzed to illustrate the findings.

Kata Kunci: Shopping variants, Economy, Efficiency

PENDAHULUAN

Di era sekarang pelaksanaan autonomi diberbagai daerah sangat meningkat, bahkan keluhan masyarakat dapat disampaikan melalui berbagai media sosial mengenai layanan publik yang menimbulkan citra buruk pada institusi pemerintah sebagai penyedia layanan pada masyarakat luas. Seiring dengan berjalannya waktu pemerintah telah fokus dalam pengembangan bidang layanan publik untuk mengontrol kinerja sumber daya manusia untuk menjaga stabilitas keuangan dalam instansi aparat pemerintahan. Hal tersebut tentunya membuat semua lapisan masyarakat menuntut pemerintahan yang bersih dan sesuai dengan aturan. Hal tersebut tentunya memaksa pemerintah untuk transparan, jadi seluruh anggaran dan keuangan pemerintah harus mengikuti sistem pencatatan akuntansi keuangan sektor publik. Tentunya dengan adanya pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien sangat penting dalam menjalankan semua program pemerintah untuk mencapai pembangunan yang sesuai dengan apa yang ditargetkan sebelumnya. Transparansi tentunya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah daerah dan masyarakat. Karena pada dasarnya data yang ada akan dibaca oleh masyarakat luas maka dari itu harus sesuai dan tidak boleh ada kesalahan.

Efektivitas pelaksanaan anggaran belanja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember dapat diukur dari tingkat pencapaian yang hampir sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari realisasi anggaran belanja yang tidak menunjukkan perbedaan signifikan dibandingkan dengan target yang direncanakan. Organisasi sektor publik dalam menjalankan kegiatannya , dana yang digunakan tentunya didapat dari masyarakat tentunya hal tersebut harus dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana memperoleh dana dari anggaran APBN, yang bersumber dari pajak, retribusi, obligasi, keuntungan BUMN/BUMD, serta sumber sah lainnya. Karena dana tersebut berasal dari masyarakat, pembangunan berkelanjutan menjadi upaya strategis dalam meningkatkan serta menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Menjaga kualitas hidup, juga menjamin kemerataan tata kelola yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan dari generasi ke generasi. Tuntutan yang harus dijalankan oleh organisasi sektor publik adalah mengelola keuangan tersebut secara transparan dan akuntabel, karena pada dasarnya hal tersebut berguna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus selalu dijaga oleh aparat yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pertahanan dan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 yang menegaskan mengenai kewajiban aparatur

pemerintah adalah memberikan pelayanan yang berkesan pada masyarakat yang membutuhkan dan harus bersikap terbuka, akuntabel, kondisiomnal, partisipasi, dan kesamaan hak. (majid jamaludin, 2023:7)

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, berbagai organisasi sektor publik, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, wajib menyusun anggaran yang disebut Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Setelah anggaran tersebut disusun, harus diajukan kepada DPRD sebagai perwakilan rakyat untuk dievaluasi. Selanjutnya, DPR akan memberikan masukan serta menetapkan keputusan dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur APBD dan APBN. Sumber dana untuk pelayanan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak berasal dari anggaran belanja negara yang dialokasikan ke daerah guna mencapai prioritas nasional. Pelaksanaannya mengikuti petunjuk teknis yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Pasal 15.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas serta disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, kemudian ditetapkan melalui peraturan daerah (Majid, 2019:64). Setelah disahkan, APBD menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan. Pada akhir tahun, pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban untuk mengevaluasi apakah anggaran yang telah direncanakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan perencanaan awal. Bentuk pertanggungjawaban ini berupa laporan realisasi anggaran yang memuat penggunaan dana yang telah diajukan.

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai alokasi, ringkasan sumber, serta penggunaan sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Laporan ini berfungsi untuk membandingkan antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi penggunaannya dalam periode tertentu Fitra Halkadri (2019:13). Laporan realisasi anggaran ini sangat penting dilakukan karena hal tersebut dapat menilai kualitas dari suatu entitas apakah entitas tersebut melakukan pemborosan atau malah menghemat anggaran yang telah dikeluarkan. Pada dasarnya tujuan dari adanya laporan realisasi anggaran ini digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari sektor publik kepada masyarakat atas pemakaian anggaran yang telah ditetapkan, karena yang akan melihat adalah semua lapisan masyarakat maka laporan harus dibuat secara sederhana dan mudah dipahami karena sesuai dengan prinsip , bahwa organisasi sektor publik harus memiliki sifat transparan.

Analisis laporan keuangan ini sebenarnya digunakan untuk mempermudah cara memahami laporan keuangan. Melalui analisis laporan keuangan, suatu entitas dapat dengan mudah memahami kondisi keuangannya, yang kemudian dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola anggaran apakah sudah sesuai dengan perencanaan atau justru melebihi target yang ditetapkan (Aning, 2024:2). Sementara itu, analisis laporan keuangan merupakan proses menguraikan data dalam laporan keuangan menjadi komponen-komponen tersendiri, menelaah setiap elemen, serta mempelajari hubungan antar komponen dengan menggunakan teknik analisis tertentu agar dapat memperoleh pemahaman yang kuat dan akurat Najmudin (2011:64)

Laporan realisasi anggaran memberikan gambaran kepada entitas publik mengenai sejauh mana penggunaan anggaran yang telah disetujui sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, kewajiban entitas sektor publik dalam menyusun laporan ini berperan penting dalam mengevaluasi aspek efisiensi ekonomi, kepatuhan, serta tanggung jawab terhadap ketentuan anggaran. Hasil dari laporan realisasi anggaran nantinya akan dicatat dalam neraca dana ekuitas yang tersedia. Seluruh laporan yang disusun mengikuti prinsip akuntansi pemerintahan.

DP3AKB Kabupaten Jember merupakan organisasi sektor publik yang memiliki peranan penting dalam perlindungan anak, program KB, dan pemberdayaan Perempuan. Tentunya organisasi sektor public tersebut memerlukan pemantauan yang ketat perihal penggunaan anggaran agar target yang dicapai bisa optimal dan anggaran yang sudah ditentukan dapat terrealisasi sebagaimana mestinya. Karena pada dasarnya DP3AKB Kabupaten Jember harus memberikan pelayanan yang maksimal untuk mensejahteraan dan memakmurkan masyarakat. Anggaran belanja harus dimanfaatkan demi kesejahteraan dan tentunya penting di lakukan evaluasi untuk menilai evisiensi penggunaan anggaran. Oleh karena itu dengan adanya laporan realisasi anggaran diharapkan dapat mengevaluasi sejauh mana anggaran tersebut digunakan dan apakah penggunaan anggaran tersebut sudah evektif dan evisien.

Laporan realisasi anggrana pada DP3AKB memasuk kan data per bidang mengenai anggrana belanja yang dilakukan selama tahun 2024. Pada dasarnya hal tersebut dapat menunjuk kan bagaimana kinerja keuangan yang dikelola dengan baik yang sesuai dengan yang telah dianggarkan sebelumnya. Pada dasarnya belanja merupakan hal yang sangat rentan dengan kebocoran karena dapat dilakukan dengan mudah. Maka hal itu memerlukan pengawasan yang tentunya bisa menjamin bahwa anggrana tersebut sudah sesuai dan sudah efektif. Anggaran tersebut harus dicatat didalam LRA setelah digunakan. Tentunya laporan yang ada akan di periksa kembali untuk memberikan informasi untuk penilaian dimasa yang akan datang.

1. Teori Varian Belanja

Analisis varian belanja merupakan analisis pada perbedaan atau selisih antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi anggaran yang sesungguhnya. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran pembaca dapat mengetahui besarnya suatu varian belanja yang pada umumnya realisasi anggaran tersebut dapat diisajikan dalam bentuk nominal maupun dalam bentuk presentase. Jadi kategori selisih dalam anggaran terbagi menjadi 2 jenis yaitu selisih tidak wajar dan selisih wajar. Apabila dalam laporan terdapat keterangan bahwa realisasi anggaran lebih kecil daripada anggaran maka hal tersebut dinamakan selisih wajar. Tetapi apabila realisasi anggaran yang dilakukan lebih besar daripada anggarannya maka hal tersebut dinamakan selisih tidak wajar Mahmudi (2010:157). Ketika penyerapan anggaran terlalu rendah maka hal tersebut juga kurang baik karena dapat dikatakan adanya kelemahan dalam perencanaan suatu anggaran, tetapi juga tidak boleh melakukan penyerapan melebihi anggaran dana yang telah direncanakan karena hal tersebut termasuk dalam pemborosan maka hal tersebut menyebabkan tidak efisien Mahmudi (2010:159). Ada beberapa manfaat dalam varian belanja yakni dapat mengetahui varian yang terjadi antara hasil yang sebelumnya dengan hasil pada periode berjalan, dapat mengetahui varian antara hasil sesungguhnya dengan biaya standar, dan tentunya dapat mempermudah dalam mengetahui varian hasil yang sesungguhnya dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Namun selain adanya manfaat tentunya varian juga memiliki keterbatasan yaitu: tidak bisa menentukan apakah suatu varian ini signifikan atau tidak, varian dapat menyesatkan pembaca ketika laporan kinerja menjadi teragregasi, berbagai manajer akan makin bergantungan pada oenjelasan dan beberapa prediksi jika varian semakin teragregasi

2. Teori Efisiensi

Analisis efisiensi diterapkan pada berbagai kalangan dan instansi pemerintah, termasuk dalam bidang pendidikan, terutama dalam penyelenggaraan program serta berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan, mengingat anggaran yang tersedia bersifat terbatas. Efisiensi berfokus pada hubungan antara masukan dan keluaran. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi didefinisikan sebagai hubungan antara input dan output, sehingga menjadi ukuran dalam penggunaan barang dan jasa oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu kegiatan dalam organisasi dapat dikatakan efisien apabila hasil kerja atau produk yang dihasilkan dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana seminimal mungkin.

Beberapa definisi lain mengenai efisiensi menyatakan bahwa efisiensi merupakan hubungan antara barang dan jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan, tanpa membuang waktu, tenaga, dan biaya secara sia-sia (Julita, 2015). Sementara itu, menurut Raharjo (2011:169), efisiensi adalah kondisi di mana suatu penyelesaian dilakukan dengan benar serta didukung oleh kemampuan yang dimiliki. Dari berbagai penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa efisiensi mencerminkan kemampuan suatu organisasi dalam menjalankan aktivitasnya dengan optimal, sehingga dapat menghasilkan output yang maksimal dengan input seminimal mungkin. Tujuan utama dari efisiensi adalah menghindari pemborosan dan pengeluaran yang tidak perlu, serta memastikan penggunaan sumber daya secara efektif.

3. Teori Tingkat Efektivitas

Menurut buku *Efektivitas Organisasi* karya Tannenbaum dan Georgopolus (1985:50), yang dikutip dalam penelitian Dewita (2018), efektivitas dapat dilihat dari pencapaian tujuan, di mana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya bergantung pada pencapaian sasaran, tetapi juga pada mekanisme yang digunakan untuk mempertahankan serta mengejar target tersebut. Dalam mengevaluasi kinerja organisasi, konsep

efektivitas menjadi faktor penting untuk menentukan apakah diperlukan perubahan dalam manajemen organisasi.

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal, baik dari segi efisiensi maupun hubungan antara input dan output. Suatu organisasi dianggap efisien dalam mengelola anggaran apabila anggaran direalisasikan sesuai prosedur yang berlaku, sedangkan efektivitas tercapai apabila anggaran digunakan dengan benar dan memberikan manfaat bagi organisasi. Menurut Mahmudi (2015:86), kegiatan operasional dikatakan efektif jika dapat mencapai tujuan dan selaras dengan sasaran akhir kebijakan.

Efektivitas pada dasarnya merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2004:134). Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi penggunaannya (Mardiasmo, 2013:132).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memahami atau menggambarkan suatu permasalahan berdasarkan fakta atau realitas dari kejadian yang diteliti, sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang objektif guna menganalisis serta menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas melalui laporan realisasi anggaran. Penelitian deskriptif dengan metode statistik digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan informasi yang telah dikumpulkan tanpa menarik kesimpulan yang bersifat umum atau melakukan generalisasi (Sugiyono, 2008, hlm. 206). Sementara itu, data kuantitatif merupakan jenis data yang dapat diukur menggunakan skala numerik atau angka (Kuncoro, 2013, hlm. 145).

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (Kuncoro, 2013, hlm. 148). Data tersebut diperoleh dari dokumentasi laporan realisasi anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember untuk periode 2024. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara tidak langsung melalui perantara, seperti arsip yang bersumber dari dokumen yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan, sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan terpaku pada konsep organisasi sektor publik yang berlandaskan tiga elemen utama, yaitu:

1. Analisis Varian Belanja

Analisis anggaran berdasarkan varian belanja itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat selisih yang terjadi antara realisasi anggaran dan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya pada tahun 2024. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui apakah realisasi anggaran tersebut lebih rendah dari anggaran yang ditetapkan atau justru lebih tinggi dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya Mahmudi, (2010:156). Meskipun tergolong sederhana, analisis varians dapat memberikan informasi yang signifikan terkait kinerja keuangan. Dalam belanja daerah, anggaran merupakan batas maksimum pengeluaran yang diperbolehkan, sehingga kinerja pemerintah daerah dianggap baik jika realisasi belanja tidak melebihi anggaran (Mahmudi, 2010, hlm. 157). Analisis varian dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Varians} = \text{realisasi belanja} - \text{anggaran belanja}$$

2. Tingkat ekonomi

dalam pengelolaan anggaran dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Tingkat Ekonomi} = (\text{Realisasi Pengeluaran} \div \text{Anggaran Pengeluaran}) \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak ekonomis.
- b. Jika hasil pencapaian antara 90–100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang ekonomis.
- c. Jika hasil pencapaian antara 80–90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup ekonomis.
- d. Jika hasil pencapaian antara 60–80%, maka anggaran belanja dikatakan ekonomis.
- e. Jika hasil pencapaian di bawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat ekonomis (Kepmendagri, 1996).



3. Rasio Efisiensi Kinerja

Rasio efisiensi dapat dihitung dengan beberapa cara yang dapat digunakan yaitu:

$$\text{Rasio Efisiensi} = (\text{Realisasi Belanja} \div \text{Anggaran Belanja}) \times 100\%$$

Tingkat efisiensi sangat berguna dalam mengukur Tingkat penghematan untuk anggaran. Suatu organisasi dapat dinilai dapat melakukan efisiensi anggaran apabila Tingkat suatu efisiensinya kurang dari 80%. Begitupun sebaliknya apabila melebihi 80% maka hal tersebut dapat dinilai terjadi pemborosan anggaran (Mahmudi, 2010:166). Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak memiliki standart baku dan tentunya memiliki nilai yang relatif.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yakni:

- a. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
- b. Jika hasil pencapaian antara 90–100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien
- c. Jika hasil pencapaian antara 80–90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
- d. Jika hasil pencapaian antara 60–80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien
- e. Jika hasil pencapaian di bawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien (Kepmendagri, 1996)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana merupakan salah satu unsur pelaksana dalam pemerintahan yang bertugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana. Dalam menjalankan fungsinya, DP3AKB Kabupaten Jember berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023, yang mengatur tentang tugas, fungsi, kedudukan, struktur organisasi, serta tata kerja dinas tersebut. Sesuai dengan peraturan tersebut tugas yang diemban oleh DP3AKB Kab Jember adalah melaksanakan urusan pemerintahdaerah mengenai pemberdayaan perempuan yang ada di kab jember tentunya berkaitan dengan program KB dan perlindungan anak yang semestinya harus dilakukan agar tidak terjadi hal yang tak terduga dalam wilayah kab jember.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam suatu daerah terutama mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tentunya setiap dinas membentuk beberapa unit kerja yang ada dibawah pengawasan DP3AKB Kab jember. Setiap dinas yang ada dikabupaten jember tentunya dipimpin oleh seorang pimpinan yang bertanggung jawab kepada bupati.

Dalam menjalankan tugasnya tentunya DP3AKB harus mempertanggungjawabkan mengenai anggrang biaya yang telah dikeluarkan selama tahun 2024 kepada pemerintah kabupaten jember. Anggrang yang telah dikeluarkan tentunya harus ada realisasinya yang ssesuai yang telah dipaparkan didalam undang undang dasar yang telah ditentukan mengenai pelaksanaan anggaran. Pengelolaan keuangan yang ada di dalam DP3AKB harus transaparan dan akuntabel karena pada dasarnya laporan realisasi anggrang tersebut akan dipertanggungjawabkan.

Didalam lampiran keputusan bupati jember no 59 tahun 2016 menyebutkan bahwa laporan realisasi anggrang penyajiannya yakni menggunakan sumberdaya yang dikelola oleh suatu dinas dalam suatu periode pelaporan tertentu. Laporan realisasi anggrang ini menggambarkan perbandingan antara anggrang dan relisasinya dalam suatu periode tertentu.

a. Analisis Deskriptif

Objek dalam penelitian ini di fokuskan pada laporan realisasi anggrang yang dikeluarkan berbagai bidang yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan keluarga berencana kabupaten pada tahun 2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang memang sudah diuji oleh peneliti. Dari data tersebut diperoleh analisis mengenai 3 aspek yakni analisis varian belanja, raio efisiensi belanja, dan tingkat ekonomis nya.

b. Analisis varian belanja

Dalam menetapkan anggaran belanja, terdapat batas maksimal yang dapat dikeluarkan oleh setiap bidang di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember. Oleh karena itu, analisis terhadap laporan realisasi anggaran dilakukan untuk menilai apakah pengeluaran yang dilakukan tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan.

Analisis varian merupakan metode sederhana yang membandingkan laporan realisasi anggaran DP3AKB Kabupaten Jember dengan anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Meskipun sederhana, analisis ini mampu memberikan informasi yang sangat penting (Mahmudi, 2010:157). Untuk mengetahui hasil analisis varian belanja, langkah selanjutnya adalah meninjau laporan realisasi anggaran berikut.

Tahun	Anggaran	Realisasi anggaran	Bertambah/Berkurang	Tingkat ekonomi
2024	Rp. 31.873.363..102	Rp. 29.731.875.732	2.141.487.370	6,72%

Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang ada dalam tabel diatas maka pada tahun 2024 dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana terdapat selisih anggrang yang lumayan dan tentunya hal tersebut sangat positif. Hal tersebut tentunya dapat dikatakan penghematan anggrang terhadap pengeluaran anggaran. Dalam tabel diatas terdapat data bahwa pada tahun 2024 anggrang yang telah direncanakan dan ditetapkan sebesar Rp. 31.873.363.102 dan realisasi anggrang nya adalah sebesar Rp. 29.731.875.732, jadi pada tahun 2024 ini anggrang belanja terserap sebesar 6,72% dari tolak anggrang yang telah direncanakan dan ditetapkan maka DP3AKB menghemat anggrang sebesar Rp. 2.141.487.370. dari hasil yang telah kita

ketahui bersama maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kab jember dinilai baik karena telah melakukan penghematan anggrana belanja yang baik.

c. Tingkat Ekonomi

Dalam pengukuran ekonomis maupun tingkat kehematan terhadap suatu tingkat biaya yang telah dikeluarkan didalam rangka melaksanakan kegiatan atau melakukan sesuatu. Dalam mengukur tingkat ekonomis dalam mengelola keuangan yakni dengan melihat perbandingan realisasi anggrana dengan anggrana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam mencari hasil tingkat ekonomis ini maka anggrana yang telah dikeluarkan (realisasi anggrana) dibagi dengan anggrana yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya dan selanjunya dikali 100% sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan diatas.

Tahun	Anggaran	Realisasi anggaran	Tingkat ekonomi	Kriteria
2024	Rp. 31.873.363..102	Rp. 29.731.875.732	6,72%	Ekonomis

Berdasarkan analisis realisasi laporan anggaran yang terdapat pada tabel diatas digambarkan bahwa anggaran yang telah ditetapkan lebih besar dari realisasi anggrannya tentunya hal tersebut sangat baik karena terdapat penghematan biaya anggaran. Dalam periode tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat ekonomi yang dilakukan oleh DP3AK Kab jember termasuk dalam kriteria yang ekonomis. Dimana dalam presentase dari rasio diatas dapat dikatakan bahwa anggaran yang telah ditetapkan adalah Rp.31.873.363..102 dari anggaran tersebut DP3AKB Kab jember telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 29.731.875.732 maka dengan adanya tingkat presentasi yang diperoleh 6,72% maka dapat dikatakan sangat ekonomis. Jadi semakin kecil tingkat presentasinya maka semakin baik kinerja keuangan mengenai laporan realisasi anggaran. Hal ini tentunya membuktikan usaha dan kinerja dari DP3AKB Kab jember bagus dan luar biasa , tentunya pihak DP3AKB telah meningkatkan kinerja keuangannya dengan memperhatikan hal hal yang dibutuhkan dalam pengeluaran anggaran jadi pada tahun 2024 bisa mencapai target ekonomis.

d. Rasio efisiensi kinerja

Menurut Nordiawan dan ayuningtyas dalam (indra christian dan sonny pangerapan : 2016) Efisiensi adalah hubungan yang terjadi antara barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan atau aktivitas dengan sumberdaya atau input yang digunakan. Suatu organisasi atau program dikaataan efisien apabila dapat menghasilkan output tertentu dengan input serendah rendahnya atau dengan input tertentu yang dapat menghasilkan output sebesar besarnya.

Sedangkan rasio efisiensi belanja adalah perbandingan antara anggrana yang telah ditetapkan dengan realisasi anggrana yang sesungguhnya yang ada pada tahun 2024. Tujuan utama dari rasio efisiensi ini adalah mengukur sejauh mana penghematan anggaran yang dilakukan oleh DP3AKB Kab Jember. Nantinya angka yang dihasilkan rasio efisiensi ini bentunya sangat relatif, jadi tidak ada standar baaku untuk penilaian yang baik atau tidaknya dalam rasio ini. Dinas pemberdayaan perempuan , perlindungan anak, dan keluarga berencana tentunya akan dikatakan baik jika rasio efisiensinya kurang dari 100% dan apabila rasio nya lebih dari 100% maka hal tersebut dapat diindikasikan sebagai pemborosan anggaran. (Mahmudi,2010:166)

Tahun	Anggaran	Realisasi anggaran	Tingkat ekonomi
2024	Rp. 31.873.363..102	Rp. 29.731.875.732	6,72%

Pada tabel diatas menggambarkan tingkat rasio efisiensi pada DP3AKB Kab Jember tahun 2024, dimana rasio efisiensinya sebesar 6,72% hal tersebut tentunya ada dibawah 100% . telah dijelaskan diatas bahwa ketika tingkat rasio nya berada dibawah 100% maka dapat dikatakan bahwa suatu organisasi tersebut telah menjalankan realisasi anggrana secara efisien dan usaha kinerja yang telah dilakukan oleh DP3AKB Kab Jember telah sesuai dan dapat memberikan penilaian baik dalam periode anggaran 2024.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan pada DP3AKB Kab Jember, setelah kita lakukan analisis terhadap laporan realisasi anggaran yang telah dikeluarkan oleh DP3AKB Kab Jember tahun 2024 maka hasil kinerja keuangan dinilai cukup baik dan tentunya tidak ada pemborosan terhadap anggaran yang telah direncanakan dan telah ditetapkan. Hal ini tentunya dapat dilihat dari analisis varian , analisis tingkat ekonomis nya dan analisis tingkat efisiensinya.

Jadi jika dilihat dalam laporan tersebut tentunya pihak DP3AKB Kab Jember bisa melakukan penghematan terhadap anggrana yang telah ditetapkan jadi realisasi anggrannya bisa dibawah anggrana yang telah ditentukan. Begitu juga dengan tingkat ekonomisnya pada tahun 2024 tercatan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh pihak DP3AKB masuk dalam kategori ekonomis karena pada data diatas sudah bahwa tingkat rasionalya di bawah 60% maka dapat dikatakan sangat ekonomis. Hal ini merupakan sebuah kinerja yang baik dan usaha yang sangat maksimal. Dan tentunya tingkat efisiensi dalam kinerja keuangan juga sangat baik. oleh karena itu hal ini menjadi contoh untuk tahun tahun berikutnya agar semakin baik dalam pengeloaan anggrana agar tidak terjadi pemborosan yang dapat berakibat fatal pada dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak adan keluarga berencana kabupaten jember.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing dan juga penulis senior. Sehingga bimbingan dan juga arahan serta masukannya yang sangat berharga terkait dengan penyusunan jurnal ilmiah ini. Tidak lupa terima kasih

kepada universitas yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan untuk melakukan penelitian. Terima kasih ini juga turut disampaikan kepada berbagai pihak salah satunya adalah para responden dan partisipan penelitian termasuk salah satunya adalah pemerintah kabupaten banyuwangi. Akhir kata, semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu pengetahuan. Segala kekurangan dalam penulisan ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Nazry, R. (2015). Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 272-283.
- Bastian, I. (2019). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik Fitra*, H. (2019). Analisis neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. IRDH Fitriyani, D. (1979). Balanced Scorecard: Alternatif Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor
- Desi, wildatun, sri, masrohatin, (2024). Peningkatan Literasi Keuangan Melalui Pengabdian masyarakat. *Jurnal Gembira*.
- Edtiyarsih, Denari, Dahana, (2023). Urgensi anggaran kas dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang efisien pada bagian perekonomian dan administrasi Tanjungpur. *Jurnal Audit dan akuntansi fakultas ekonomi Universitas Tanjungpura*.
- Harjito, D., & Haryanto, E. (2019). Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Gramedia.
- Kuncoro, Mudrajad (2013) Metode Riset Bisnis dan Ekonomi, Edisi ke empat, Erlangga Lontaan, I. C., & Pangerapan, S. (2016). Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten.
- Kusumawati, W. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Anggaran dan Realisasi Anggaran. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 15(2), 45-58.
- Mahmudi (2016) Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta Mahsun, dkk (2015). Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga, BPFE. Yogyakarta.
- Mardiasmo, M. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Minahasa Tahun Anggaran 2012-2014. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Renyowijoyo, Muindro (2013). Akuntansi Sektor Publik, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Siti, Nurul, Abdul, (2022). Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi masyarakat kampung Sustainable Developmend Gols dalam Peningkatan kesejahteraan. *Jurnal Managemen Dan Keuangan Syariah*